

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan menjadi media bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan mengenai pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pemenuhan kebutuhan pihak-pihak eksternal yaitu diperolehnya informasi kinerja perusahaan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi dana mereka. Parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen dalam laporan keuangan adalah informasi laba yang terkandung dalam laporan laba-rugi (Boediono, 2005). Informasi laba menjadi bagian dianggap paling penting, karena informasi tersebut secara umum dipandang sebagai representasi kinerja manajemen pada periode tertentu.

Ahmed dan Belkaoui (2000) menjabarkan pentingnya informasi laba bagi pihak-pihak yang berkepentingan, **pertama** karena laba dijadikan dasar bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan deviden. **Kedua**, laba merupakan dasar dalam memperhitungkan kewajiban perpajakan perusahaan. **ketiga**, laba dipandang sebagai petunjuk dalam menentukan arah investasi dan pembuat keputusan ekonomi. **Keempat**, laba diyakini sebagai sarana prediksi yang membantu dalam memprediksi laba dan kejadian ekonomi dimasa mendatang, dan **kelima**, laba dijadikan pedoman dalam mengukur kinerja.

Menurut teori keagenan (*agency theory*), adanya pemisahan antara pemilik dan pengelola dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problems*). Masalah tersebut yaitu ketidaksejajaran kepentingan antara pemegang saham atau prinsipal (*principal*) dengan manajer atau agen (*agent*). Jansen and Meckling (1976) memandang baik prinsipal maupun agen berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan diri sendiri, sehingga ada kemungkinan besar agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal. Konflik ini juga tidak terlepas dari kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan sendiri dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Hal ini terjadi karena walaupun manajer memperoleh kompensasi dari pekerjaannya, namun pada kenyataannya perubahan kemakmuran manajer sangat kecil dibandingkan perubahan kemakmuran pemilik/pemegang saham (Jansen dan Murphy, 1990).

Manajer dapat memodifikasi laporan keuangan yang disusun untuk menghasilkan jumlah laba (*earning*) yang diinginkan. Manajemen suatu perusahaan menyiapkan laporan keuangan dengan menggunakan cara yang berbeda sesuai dengan tujuan masing-masing perusahaan. Laporan keuangan harus mengikuti standar akuntansi keuangan bila diterbitkan untuk orang lain seperti pemegang saham, kreditur, karyawan dan masyarakat luas sehingga memberikan keleluasaan manajer untuk memilih metode akuntansi dalam menyusun laporan keuangan.

Manajer dapat menggunakan pengetahuan bisnis dan peluang untuk memilih metode, estimasi, dan pengungkapan yang sesuai dengan

perusahaan. Akan tetapi, penggunaan pertimbangan manajemen dalam laporan keuangan dapat menciptakan kesempatan untuk melakukan manajemen laba di mana manajer memilih metode dan estimasi yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan (Healy and Wahlen, 1999). Selain itu, informasi yang relatif lebih banyak dimiliki manajer dibandingkan dengan pihak luar dapat memunculkan informasi yang tidak seimbang (*information asymmetry*). Adanya asimetri informasi yang tinggi antara manajemen dan pihak lain yang tidak mempunyai sumber, dorongan, atau akses yang memadai terhadap informasi mempersulit pihak-pihak untuk memonitor tindakan manajer (Richardson, 2000). Hal ini menyebabkan manajemen akan berusaha memanipulasi kinerja perusahaan yang di laporkan untuk kepentingan sendirinya.

Beberapa contoh rekayasa keuangan yang telah memunculkan kasus pelaporan akuntansi disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Kasus Pelaporan Akuntansi di Indonesia

Perusahaan	Kasus
PT. Kimia farma Tbk.	PT Kimia Farma menyajikan laporan keuangan yang <i>overstate</i> sebesar Rp.32,7 miliar untuk tahun 2001. Direktur produksi mengotorisasi dua buah daftar harga persediaan yang salah satunya digelembungkan nilainya. Dengan begitu beban pokok penjualan menjadi lebih rendah sehingga labanya menjadi naik.

PT. Bank Lippo Tbk.	Kasus ini merupakan kasus penerbitan laporan keuangan ganda yang memuat informasi berbeda antara yang dipublikasikan ke publik dengan yang disampaikan ke BEJ pada tahun 2002. Salah satu perbedaannya adalah PT Bank Lippo melaporkan laba sebesar Rp.98,77 miliar kepada publik sedangkan pada laporan yang ditujukan ke BEJ melaporkan kerugian sebesar Rp.1,273 Triliun.
PT Ades Alfindo	Kasus ini terungkap pada tahun 2004 ketika manajemen baru PT Ades menemukan inkonsistensi pencatatan atas penjualan periode 2001-2004. Hasil penelusuran menunjukkan angka penjualan yang lebih tinggi antara 0,6 - 3,9 juta gallon dibandingkan angka produksi.
PT Perusahaan Gas Negara	Kasus ini adalah kasus penundaan publikasi informasi material atas penurunan volume gas yang diketahui oleh manajemen sejak September 2006 tapi baru dipublikasikan Maret 2007. Penurunan volume gas yang tidak dilaporkan sejak September 2006 tersebut telah memberikan informasi yang menyesatkan kepada investor.
PT Indofarma Tbk.	Kasus ini merupakan kasus kekeliruan dalam penyajian laporan keuangan. Nilai barang dalam

	<p>proses yang disajikan dalam laporan keuangan PT. Indofarma pada 2010 lebih tinggi dari nilai yang seharusnya dilaporkan. Akibatnya harga pokok produksi menjadi lebih rendah dan laba menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya.</p>
--	---

Sumber: Sulistyawan, dkk (2011)

Dari beberapa contoh kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa kasus pada perusahaan terjadi karena adanya kesempatan dari pihak manajemen untuk melakukan praktik *creative accounting* yang salah satunya adalah manajemen laba (*earning manajemen*) yang mengarah pada moral *hazard*. Pihak manajemen dengan segala motivasinya melakukan aktivitas-aktivitas untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan keinginan manajemen. Memainkan celah-celah ketidaksempurnaan aturan akuntansi yang berlaku, guna menghasilkan nilai laba sesuai dengan keinginan manajer. Hal ini dapat memunculkan salah penilaian bagi para pengguna laporan keuangan, sehingga menimbulkan suatu mekanisme transaksi yang tidak *fair*.

Aktivitas rekayasa membuat laporan keuangan tidak relevan lagi dengan kebutuhan pemilik perusahaan. Laporan keuangan tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai media pertanggungjawaban manajer kepada pemilik karena informasi-informasi yang terkandung disesuaikan dengan kepentingan manajer. Aktivitas ini tidak hanya memberikan dampak negatif kepada pemilik saja tetapi juga merugikan pihak lain yang

menggunakan informasi keuangan tersebut. Pihak yang berkepentingan akan melakukan kesalahan dalam mengalokasikan sumber daya. Apabila hal ini dilakukan dalam jangka panjang maka mempengaruhi perekonomian suatu Negara.

Scott (2009) mengemukakan faktor-faktor yang mendorong manajer melakukan manajemen laba adalah rencana bonus, kontrak hutang jangka panjang (*debt covenant*), motivasi politik (*political motivation*), motivasi perpajakan (*taxation motivation*), pergantian CEO (*Chief Executive Officer*), dan penawaran saham perdana (*Initial Public Offering*).

Untuk mengurangi perilaku manajemen laba dan meningkatkan kualitas laporan keuangan, maka perlu dilakukan tata pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Chtourou *et al.* (2001) mencatat prinsip *good corporate governance* yang diterapkan dengan konsisten dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

Pelaksanaan *good corporate governance* dapat dilakukan melalui mekanisme internal seperti struktur kepemilikan manajerial, struktur dewan komisaris, kompensasi eksekutif dan mekanisme eksternal, seperti pengendalian oleh pasar, kepemilikan institusional, tingkat pendanaan dengan hutang, dan pelaksanaan audit oleh auditor eksternal (Barnhart *and* Rosenstein, 1998). Penerapan *good corporate governance* dapat

dilakukan melalui mekanisme monitoring untuk menyelaraskan berbagai kepentingan antara lain: (1) memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (*managerial ownership*) (Jansen and Mckling, 1976), sehingga kepentingan pemilik atau pemegang saham dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer. Semakin besar kepemilikan manajerial semakin rendah kecenderungan manajemen untuk melakukan aktivitas manajemen laba karena adanya keselarasan tujuan pemegang saham dan manajemen. (2) Kepemilikan saham oleh Investor institusional, Midiastuty dan Mahfoedz (2003) menyatakan bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan kepemilikannya yang besar. Semakin besar kepemilikan institusional pada perusahaan, maka semakin rendah kecenderungan manajemen melakukan aktivitas manajemen laba. Hal ini disebabkan karena adanya fungsi pengawasan yang lebih baik dari investor yang *sophisticated*. (3) Melalui peran monitoring oleh dewan komisaris (*board of directors*). Dechow *et al.* (1995) dan Beasley (1996) menemukan hubungan yang signifikan antara dewan komisaris dengan pelaporan keuangan. Mereka menemukan bahwa ukuran dan independensi dewan komisaris mempengaruhi kemampuan mereka dalam memonitor proses pelaporan keuangan. (4) Membentuk komite audit sebagai pengawas perusahaan. Komite audit merupakan pihak yang membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan serta peningkatan efektivitas eksternal dan internal audit (Sulistyanto, 2008).

Warfield *et al.* (1995), Midiastuty dan Machfoedz (2003), Ujiyantho dan Pramuka (2007), dan Ali *et al.* (2008) menemukan adanya hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dan *discretionary accruals* sebagai ukuran dari manajemen laba. Namun Boediono (2005), Ornet *et al.* (2006) dan Cornet *et al.* (2009) menemukan hasil positif dan signifikan antara kepemilikan manajerial dengan manajemen laba.

Rajgopal *et al.* (1990) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional mampu menjadi konstrain bagi perilaku manajemen laba setelah mereka menemukan adanya hubungan negatif antara nilai *absolute discretionary accrual* sebagai proksi manajemen laba dengan tingkat kepemilikan institusional. Penelitian yang dilakukan Boediono (2005) menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kepemilikan institusional terhadap manajemen laba. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa investor institusional adalah pemilik sementara yang biasanya terfokus pada *current earnings*. Akibatnya manajer terpaksa untuk melakukan tindakan yang dapat meningkatkan laba jangka pendek, misalnya dengan melakukan manajemen laba.

Hasil penelitian Jansen (1993), Beasley (1996), dan Yermarck (1996) menemukan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka semakin besar kecurangan dalam pelaporan keuangan. Nasution dan Setiawan (2007) juga menemukan hubungan positif antara ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan. Hasil ini kontradiktif dengan penelitian Chtourou *et al.* (2001) yang menemukan

bahwa ukuran dewan komisaris berhubungan negatif dengan manajemen laba.

Beasley (1996) dan Chtourou *et al.* (2001) membuktikan bahwa perusahaan yang melakukan kecurangan mempunyai persentase dewan komisaris eksternal yang signifikan lebih rendah daripada perusahaan yang tidak melakukan kecurangan. Hal ini didukung pula oleh penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007) yang menemukan bahwa komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba perusahaan perbankan. Hal ini menandakan bahwa *good corporate governance* yang diajukan melalui keberadaan pihak independen dalam dewan komisaris mampu mengurangi tindak manajemen laba yang terjadi dalam perusahaan perbankan. Hasil penelitian Boediono (2005) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara komposisi dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dengan manajemen laba. Sedangkan Shah *et al.* (2009) tidak menemukan adanya hubungan antara komposisi dewan komisaris independen dengan manajemen laba pada perusahaan-perusahaan di Pakistan.

Klein (2002) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara komite audit yang independen dengan akrual tidak normal sebagai proksi manajemen laba. Xie *et al.* (2001) melaporkan bahwa jumlah pertemuan komite audit berhubungan negatif dengan manajemen laba. Siregar dan Utama (2005) tidak menemukan pengaruh dari keberadaan komite audit terhadap manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Thoopsamut dan

Jaikengkit (2008) menemukan bahwa rata-rata umur anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba sedangkan jumlah pertemuan komite audit dan proporsi anggota komite audit yang berpengalaman di bidang akuntansi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Thailand.

Faktor lain yang mempengaruhi praktik manajemen laba yaitu ukuran perusahaan. Terdapat dua pandangan tentang bentuk ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. **Pandangan pertama**, ukuran perusahaan yang kecil dianggap lebih banyak melakukan praktik manajemen laba daripada perusahaan besar. Hal ini dikarenakan perusahaan kecil cenderung ingin memperlihatkan kondisi perusahaan yang selalu berkinerja baik agar investor menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. **Pandangan kedua**, perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat (Nasution dan setiawan, 2007). Akan tetapi, pandangan kedua memandang ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap manajemen laba. Watts *and* Zimmerman (1990) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar memiliki biaya politik tinggi lebih cenderung memilih metode akuntansi untuk mengurangi laba yang dilaporkan di bandingkan perusahaan-perusahaan kecil. Biaya politik tinggi muncul dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat

menarik media dan konsumen. Perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik cenderung untuk melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung (Scott, 2009).

Dalam kaitannya dengan *leverage*, salah satu alternatif sumber dana perusahaan selain menjual saham di pasar modal adalah melalui sumber dana eksternal berupa hutang. Perusahaan akan berusaha memenuhi perjanjian hutang agar memperoleh penilaian yang baik dari kreditur. Hal ini kemudian dapat memotivasi manajer melakukan manajemen untuk menghindari pelanggaran perjanjian hutang. Penelitian yang dilakukan oleh Dechow *et al* (1996) menemukan bahwa motivasi perusahaan melakukan manajemen laba adalah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan eksternal dan memenuhi perjanjian hutang. Jones dan Sharma (2001) menemukan *leverage* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tiga model akrual pada *old economy sector*, akan tetapi, hasil penelitian Suwito dan Herawati (2005) dan Murhadi (2009) menemukan bahwa *leverage* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Perbedaan dari hasil penelitian (*research gap*), maka penelitian ini mencoba meneliti kembali hubungan antara *good corporate governance*, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba dengan menggunakan variabel-variabel yang digunakan yaitu kepemilikan

manjerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, dan manajemen laba.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Nasution dan Setiawan (2007) yang meneliti mengenai pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap manajemen laba di industri perbankan Indonesia. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *good corporate governance* (ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit) dan ukuran perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada jenis industri yang diteliti. Jenis industri yang digunakan dalam penelitian ini adalah industri manufaktur sedangkan Nasution dan Setiawan (2007) melakukan penelitian pada industri perbankan.

Penelitian ini juga menambah variabel *good corporate governance*, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan *leverage* dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Midiastuty dan Machfoedz, 2003).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *good corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dan komite audit secara signifikan dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

2. Apakah ukuran perusahaan (*size*) secara signifikan dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Apakah *leverage* secara signifikan dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dan komite audit secara signifikan terhadap tindakan manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan (*size*) secara signifikan terhadap tindakan manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
3. Untuk menganalisis pengaruh pada *leverage* secara signifikan terhadap tindakan manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:
 - a. Digunakan sebagai studi komparatif antara ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dengan penerapannya mengenai pengaruh *good corporate governance* (kepemilikan manajerial, kepemilikan

institusional, ukuran dewan komisaris, komite audit), ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap manajemen laba perusahaan.

- b. Memberikan bukti empiris bagi para akademisi sekaligus sebagai referensi dan informasi tentang pengaruh *good corporate governance* (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dan komite audit), ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap manajemen laba perusahaan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis:

- a. Menjadi acuan atau referensi bagi pihak manajemen perusahaan untuk mengetahui kinerja perusahaannya dalam rangka pengambilan keputusan-keputusan strategis di masa yang akan datang, serta menunjukkan bagaimana pengelolaan perusahaan yang baik sehingga dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dalam internal perusahaan.
- b. Sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya investor atau calon investor untuk pengambilan keputusan investasi pada perusahaan secara tepat sehingga memberikan *feedback* atas investasi yang akan atau telah dilakukan di masa yang akan datang.